

Ijtima Ulama 2 dan

Kekhawatiran Agama Jadi Komoditas Politik

Reporter: Tempo.co

Editor: [Juli Hantoro](#)

Senin, 17 September 2018 08:18 WIB



Calon Presiden RI Prabowo Subianto (tengah), saat konferensi pers Sidang Pleno Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu, 16 September 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) menggelar [Ijtima Ulama 2](#) pada Ahad, 16 September 2018. Tokoh dan ulama termasuk Rizieq Shihab yang mengikuti acara itu lewat sambungan video konferensi sepakat menyatakan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo - Sandiaga Uno dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019.

Baca juga: [Ada Penolakan Ijtima Ulama II, Sekjen PAN: Dukungan Ulama Penting](#)

Keputusan Ijtima Ulama 2 ini berbeda dengan keputusan pada Ijtima Ulama 1 yang merekomendasikan nama calon wakil presiden Prabowo adalah Abdul Somad dan Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan Ijtima Ulama 2, Prabowo diminta menjelaskan mengapa tak memilih dua nama yang direkomendasikan tersebut.

Tidak diketahui apa alasan yang diungkapkan Prabowo soal alasan dia memilih Sandiaga Uno, bukan dua nama yang direkomendasikan di atas. Namun dalam beberapa kesempatan Prabowo mengatakan ia tak ingin memecah belah umat karena di kubu Jokowi telah memilih ulama sebagai calon wapres yaitu Ma'ruf Amin.

Prabowo, usai penandatanganan pakta integritas menyampaikan, terima kasih dan terharu atas dukungan yang diberikan oleh ijtima ulama2.

"Atas nama Prabowo-Sandiaga mengucapkan terima kasih kepada Ijtima Ulama 2 dari GNPF Ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, atas dukungan yang begitu ikhlas diberikan, ini sungguh adalah waktu yang mengharukan bagi diri saya, dan saya sudah berjanji kepada ijtima akan saya berbuat yang terbaik, seluruh jiwa dan raga saya persembahkan kepada bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo.

Gelaran Ijtima ulama ini sempat disinggung oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia berharap masalah agama tidak dibawa ke dalam urusan politik.

"Bukan enggak ada hubungannya antara agama dan politik. Ada (hubungannya), cuma jangan dibawa ke arah politik yang akhirnya masyarakat menjadi bingung," kata Moeldoko di area tugu Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

Mantan panglima TNI ini menyarankan agar para pemuka agama tetap fokus pada kegiatannya membimbing umat. Jika terus bermain politik, kata Moeldoko, masyarakat yang akan terkena imbasnya. "Kasihani umat. Mau ke mana nanti," ucapnya.

Menurut Moeldoko, sudah banyak publik figur yang tadinya aktif di kegiatan agama lalu beralih ke politik malah ditinggal jamaahnya. Ia berharap hal ini tidak sampai terjadi kepada para tokoh agama yang menggelar Ijtima Ulama 2 ini.

Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizieq Shihab membantah tengah memainkan politik transaksional melalui Ijtima Ulama 2.

"Para ulama bukan sedang menjalankan politik transaksional. Dukungan kami ikhlas untuk Prabowo - Sandiaga," kata Rizieq melalui pesan suaranya kepada peserta Ijtima Ulama II pada Ahad, 16 September 2018, di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta.

Rizieq mengklaim, adanya kesepakatan yang tandatangani dalam Ijtima Ulama 2 murni dilakukan untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Ia juga mengatakan kemenangan yang nanti diperoleh dari pasangan yang diusungnya merupakan kemenangan berkah.

Baca juga: [Ijtima Ulama 2, Begini Kata Sandiaga Soal Janji Pulangkan Rizieq](#)

Kesepakatan untuk mendukung Prabowo-Sandiaga telah ditandatangani para petinggi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dalam Ijtima Ulama II. Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional II nomor

01/IJTIMA/GNPF-ULAMA/MUHARRAM/1440 H tentang penetapan Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Dengan terbitnya pakta integritas itu, Rizieq meminta pengikutnya menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden yang diusung.

Pentolan FPI itu mengatakan dukungan ini dilakukan untuk memperjuangkan politik negara yang tunduk akan syariat dan konstitusi. Dia pun emoh bila ada pihak menyebut hal ini sebagai transaksi politik.

Bagi Rizieq, yang dilakukan dalam Ijtima tersebut merupakan politik identitas. Politik identitas, kata dia, juga pernah dilakukan para pahlawan untuk melawan penjajah. Di antaranya pada masa Teuku Umar, Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro.

"Politik identitas juga pernah dilakukan Soekarno saat menandatangani piagam Jakarta dan Dekrit Presiden 1959," katanya. Rizieq mengklaim, ia dan kelompok penggerak 212 juga pernah menggalakkan politik identitas pada Pilkada DKI 2017 lalu dalam rangka mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Politik yang dimaksud ini dilakukan untuk menjunjung tinggi ayat suci di atas ayat konstitusi. "Agar konstitusi negara dan semua turunan perundang-undangnya selalu terjaga dan terkawal," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Presidium Aksi Bela Islam, Kapitra Ampera meminta Ijtima Ulama 2 dibatalkan jika isi rekomendasinya tidak mengindahkan rekomendasi Ijtima Ulama I dan malah bermuatan politik praktis.

Baca juga: [Prabowo Tandatangani Pakta Integritas Ijtima Ulama II, Ini Isinya](#)

Dari informasi yang diperoleh Kapitra, Ijtima Ulama 2 akan mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres-cawapres Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Saya minta batalkan Ijtima Ulama 2 kalau cuma mau dukung Prabowo-Sandi dengan kontrak politik. Antum pasti kecewa," kata Kapitra dalam konferensi pers, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, jika Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama berkomitmen pada isi rekomendasi Ijtima Ulama I, maka seharusnya ulama yang menjadi capres atau cawapres, namun yang terjadi, Sandiaga Uno yang dijadikan bakal cawapres mendampingi Prabowo padahal Sandi merupakan pengusaha dan politisi.

Pihaknya pun heran dengan keputusan [Ijtima Ulama 2](#) yang mendukung Prabowo - Sandiaga.

"Ijtima Ulama I merekomendasi cawapresnya Prabowo dari ulama. Tapi ini diabaikan, ijtima dikhianati. Nama Sandi tidak masuk dalam rekomendasi itu. Kalau Ijtima Ulama 2 cuma bela Prabowo dan Sandi, berarti kita cuma terpolarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Kembali ke Ijtima Ulama I, bahwa ulama harus jadi wapres," kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

AHMAD FAIZ | FRANSISC CHRISTY | ANTARA